

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan perumusan masalah serta hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Penganggaran berbasis kinerja dalam bentuk perumusan strategi, perencanaan strategis, pembuatan program, penganggaran, implementasi, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, telah diterapkan / dilaksanakan dengan sangat baik, meskipun masih terdapat beberapa Pemerintah Daerah yang perencanaan strategiknya tidak selalu mencerminkan target yang akan dicapai yang menyebabkan masalah dalam penganggaran, seperti terjadinya beban kerja anggaran yang terlalu berat, dan alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran.
2. Pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dalam bentuk akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas keuangan telah dilaksanakan dengan baik, meskipun ada sebagian pemerintah daerah yang dalam pencapaian akuntabilitas kinerja instansinya masih tergolong rendah, seperti dalam pencapaian akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan.
3. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dari hasil tersebut dapat

diartikan bahwa jika Penganggaran Berbasis Kinerja ditingkatkan maka akan diiringi dengan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman SKPD dalam hal teknis pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dengan memberikan pelatihan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan pendampingan pelaksanaannya oleh pemerintah pusat. Demikian juga pemerintah pusat sebaliknya membuat standar yang lebih baik dan acuan tentang penyusunan APBD berbasis kinerja.
2. Meningkatkan profesionalitas inspektorat dalam pelaksanaan pengendalian. Demikian pula meningkatkan kemampuan Inspektorat dalam pengukuran dan penilaian hasil kegiatan SKPD sesuai target yang ditetapkan. Demikian pula pelatihan akuntansi pemerintah dan auditing untuk mendeteksi kecurangan, memantau dan mendorong pelaksanaan tindak lanjut atas temuan-temuan penyimpangan yang telah dilaporkan. Kepala daerah juga disarankan agar Inspektorat dijadikan organisasi fungsional.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti permasalahan sejenis, maka sebaiknya melakukan penelitian pada subjek lain yang lebih luas atau pun faktor-faktor lain yang mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu peneliti selanjutnya bisa mengambil sampel yang lebih luas.